

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Permenkumham 17/2018 maka pencatatan pendaftaran CV yang semula didaftarkan di Pengadilan Negeri beralih didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Akibat hukum terhadap pencatatan pendaftaran CV yang salinannya hilang atau rusak, maka tidak mungkin secara Resmi dapat didaftarkan dikarenakan ketentuan didalam Pasal 23 ayat (1) tentang adanya kewajiban melampirkan cap stempel pada saat pencatatan pendaftaran, sementara Pengadilan Negeri sejak diberlakukannya Permenkumham 17/2018 sudah tidak lagi melayani adanya pencatatan dalam bentuk apapun.
3. Akibat hukum terkait dengan CV yang tidak didaftarkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, secara hukum merupakan pendaftaran yang resmi, hanya saja pendaftaran tersebut tidak dapat menggunakan nama CV yang sudah ada didalam database SABU, sebagaimana ditentukan pada Pasal 23 ayat 2 Permenkumham 17/2018.

3.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seyogyanya memberikan sosialisasi secara intensif kepada seluruh masyarakat khususnya pelaku usaha terkait adanya peraturan pendaftaran terhadap CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
2. Seyogyanya Permenkumham 17/2018 lebih mengatur secara tegas terkait dengan adanya penyimpangan pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 23 ayat (1) yaitu tentang kewajiban melampirkan cap stempel Pengadilan Negeri.
3. Saran kepada Notaris sebagai penerima kuasa pencatatan pendaftaran CV agar dalam pencatatan pendaftaran benar-benar mengindahkan ketentuan Pasal 23 Permenkumham 17/2018 dengan melampirkan kebenaran bukti terdaftar di pengadilan negeri berupa cap stempel pada salinan sebagai bukti pencatatan pendaftaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal, Buku, dan Undang-Undang serta Peraturan Menteri:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018

Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Keputusan Kongres Luar Biasa INI tanggal 27 Januari 2005 tentang Kode Etik Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Bakir, R. S., (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.

Jamil, M., (2015), “*Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dijadikan Jaminan Hutang Di Lembaga Perbankan*” (*Objek Jaminan Penjelsan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Mengenai Girik Dan Petuk*).”, Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kosasih, J. I., dan Laksmi Dewi, A. A. S., (2019). *Problematika Hukum Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap/CV) Dalam Ranah Hukum Bisnis dan Perbankan*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Lestari, D., (2019), *“Peranan Notaris Dalam Pendirian CV Paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata”*, Thesis, Universitas Sumatera Utara.
- Novita Sari, S. F. D., (2018). *“Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.”* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Lex Renaissssance, Vol 3 No. 2.
- Putri, W. A., (2019), *“Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik.”*, Master Thesis, Universitas Sriwijaya.
- Rahardjo, H., (2013), *Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Ratnawati, A., (2015), *“Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum.”*, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Volume II.
- Soekardono, R., (1957), *Hukum Dagang Indonesia Djilid I*. Jakarta: Penerbit Soeroengan.
- Soekanto, S., (2002), *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Dosen Hukum Perseroan, (2011), *Buku Ajar Hukum Perseroan*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Utami, P. Y. D., (2020), *“Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.”* Jurnal Komunikasi Hukum DOI: [10.23887/jkh.v6i1.23432](https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23432)

Internet:

Simorangkir, K. T., (2018), Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata., Kolom Hukum online. Diakses pada 10 Mei 2020 dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb6ea52a874e/catatanpermenkumham-pendaftaran-cv--firma-dan-persekutuan-perdata-olehkristiantakasdo-simorangkir/>.

Duha, D., Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap*) yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau dar Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Diakses pada 1 Desember2020.<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1422022&val=4097&title=KEPASTIAN%20HUKUM%20AKTA%20PENDIRIAN%20PERSEROAN%20KOMANDITER%20COMMANDITAIRE%20VENNOTSCHAP%20YANG%20TIDAK%20DIUMUMKAN%20DALAM%20BERITA%20NEGARA%20DITINJAU%20DARI%20KITAB%20UNDANG-UNDANG%20HUKUM%20DAGANG>

Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya oleh Erizka Permatasari, S.H. Klinik Hukum online, Diakses pada tanggal 15 Mei 2020 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dankarakteristiknya/>.

Sekelumit Tentang Persekutuan Komanditer. (2002). Berita Hukum Online, Diakses pada tanggal 15 Mei 2020, dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17820/sekelumitentangpersekutuan komanditer/>

Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Hukum Perseroan Terbatas.

2019. Di akses pada 20 September 2020, dari

<https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/pendaftaran-cv-firma-dan-persekutuan-perdata/>.

Rojabi, Afdan. Kuesioner (Research Methodology), (2019), Diakses pada tanggal

12 Agustus 2020 dari <https://medium.com/@afdanrojabi/kuesioner-research-methodology-547df061b0e5>.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SURAT RISET KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Jalan MT. Haryono No. 38, Air Putih, Samarinda Ulu 75124
Laman : <https://kalim.kemenkumham.go.id/>
Email : kanwilkalim@kemenkumham.go.id

04 Maret 2021

Nomor : W.18-UM.01.01 – 1229
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di –

Yogyakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 1680/V/CVD-FH, tanggal 16 Februari 2021, perihal Izin Riset di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, dengan ini diberitahukan bahwa kami menyetujui dan memberi izin kepada mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta :

Nama : **TERUNA TUNJUNG PUTERA**
NIM : 160512437
Program Studi : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi : Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Selanjutnya yang bersangkutan agar melapor kepada Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan wajib untuk mentaati segala peraturan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Sofyan

NIP. 19641024 198503 1 002

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
3. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
4. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5. Kepala Divisi Administrasi

LAMPIRAN 2: SURAT RISET NOTARIS PAULUS ADAM, S.H., M.Kn.



PAULUS ADAM, SH., M.Kn
Notaris & PPAT Kota Samarinda

Nomor : 18/N/IV/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Samarinda, 23 April 2021

Kepada Yth,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Di –
Yogyakarta

Dengan Hormat,

Menanggapi Surat Nomor 1682/V/CVD-FH, tertanggal 16 Februari 2021, perihal Izin Riset yang dilakukan melalui kantor notaris Paulus Adam S.H., M.Kn, saya bersedia memberi izin untuk melakukan riset/penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama : **TERUNA TUNJUNG PUTERA**
NPM : 160512437
Program Studi : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi : Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Paulus Adam, S.H., M.Kn.
Notaris & PPAT Kota Samarinda

**LAMPIRAN 3: SURAT RISET PENGADILAN NEGERI KOTA
SAMARINDA.**



PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan. M.Yamin No.1 Samarinda Telp.(0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : www.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

SAMARINDA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W18- UI / ¹²⁰HK.021.1/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri / HI /Tipikor Samarinda, dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Nomor : 0088/V/CVD-FH pada tanggal 17 Maret 2021 dari Fakultas Hukum Universitas ATMA JAYA YOGYAKARTA adalah Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : TERUNA TUNJUNG PUTERA
NIM : 16.0512437
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsestrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah melakukan Penelitian dan atau /Interview di Pengadilan Negeri / HI /Tipikor Samarinda mulai tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**“PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP) PASKA PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN
FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : SAMARINDA

Pada tanggal : 31 Maret 2021

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SMARINDA

PANITERA,



PARULIAN HASIBUAN, SH

NIP. 19630226 198412 1 001

**LAMPIRAN4: SURAT RISET PIMPINAN WILAYAH IKATAN
NOTARIS INDONESIA KOTA SAMARINDA NOTARIS WAWAN
SYAHRANIE, S.H., M.Kn.**



**PENGURUS DAERAH
KOTA SAMARINDA
IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 11/INI-SMD/III/2021

Berdasarkan surat dari Universitas ATMA JAYA YOGYAKARTA Fakultas Hukum
Nomor : 1681/V/CVD-FH, tanggal 16 Februari 2021, menerangkan bahwa.

Nama : TERUNA TUNJUNG PUTERA

No. Mahasiswa : 160512437

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah melaksanakan Penelitian untuk menyusun skripsi di Kantor Notaris Wawan Syahrani S.H.MKn Ketua Pengurus Daerah Kota Samarinda Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan judul Skripsi "PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP) PASKA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA" di kota Samarinda.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 09 Maret 2021

Ketua Pengurus Daerah Kota Samarinda

Ikatan Notaris Indonesia (INI)



Wawan Syahrani S.H.MKn

Sekretariat Jalan AW.Syahrani Gang Walet 1 Nomor 7 – Samarinda
HP : 0812 8333 9403 – 0823 5321 5318